

# Istana Jawa dan Gelar



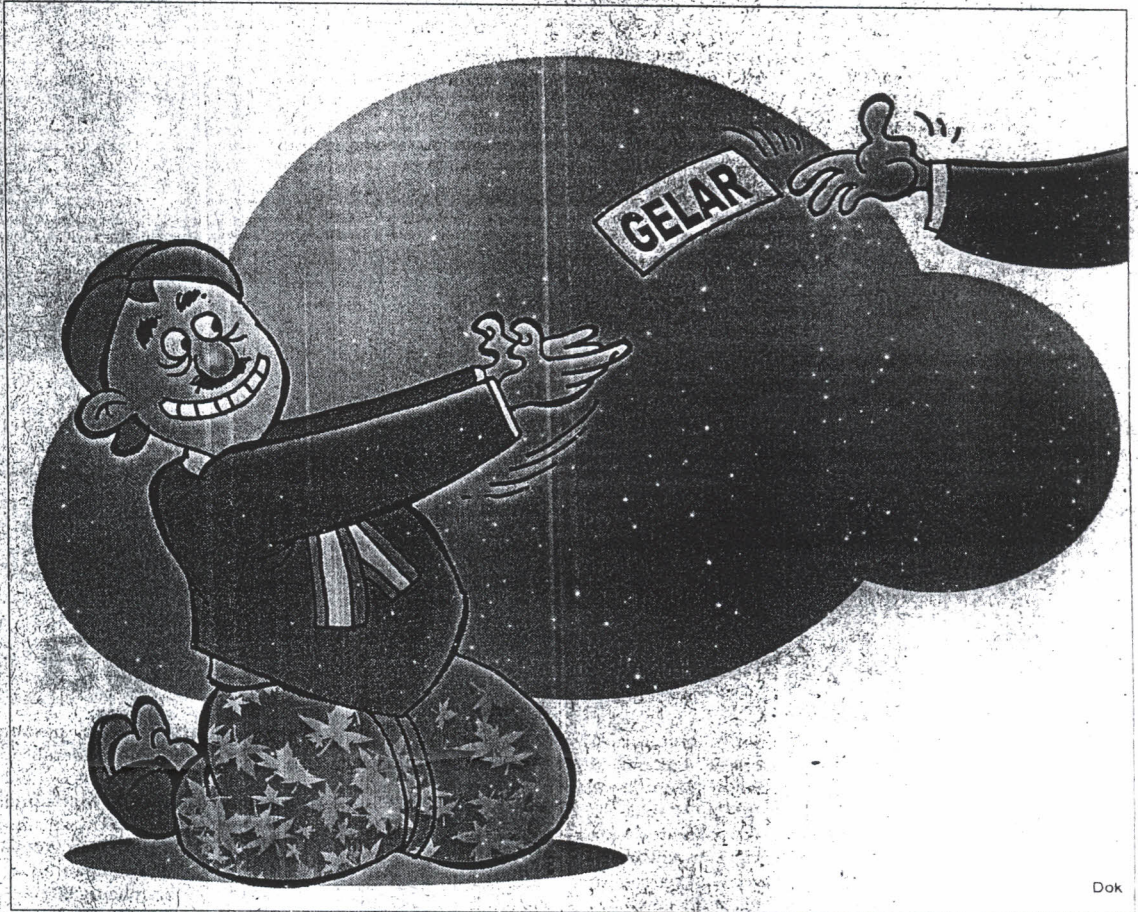
**Heri Priyatmoko**

Dosen Sejarah, Universitas  
Sanata Dharma  
Sejarawan Solo

**B**urung-burung prenjak bercericit. Berloncatan dari pepohonan sawo di halaman muka istana Kasunanan Surakarta yang konon berjumlah 77 buah itu. Dedaunan melambai pelan seakan menirukan para penari Bedhaya Ketawang yang halus dan sakral di hadapan raja dan tetamu sehingga membuahakan kesejukan dan ketenangan. Saking tenang dan khidmatnya acara tersebut, pipi Paku Buwana XIII basah oleh air mata. Ada keharuan yang terlukis dalam wajahnya yang kepayahahan itu.

Kali ini, *tinggalan jumenengan* (peringatan naik takhta) yang dihelat pada Sabtu (22/4) berjalan lancar, tanpa diwarnai kemelut keluarga bangsawan Jawa. Sebagaimana diberitakan oleh para jurnalis, dalam gelaran sakral kemarin tidak ada sesi bagi-bagi gelar seperti yang sudah-sudah, meski raja yang sah hadir. Hal ini memang disengaja dikerjakan demi meredam cap buruk keraton yang mengobrol gelar.

Dalam catatan sejarah dinasti Mataram Islam, *tinggalan jumenengan* senanti-asa memang diikuti pemberian gelar oleh raja kepada orang yang dianggap punya kontribusi dengan kemajuan istana. Santer beredar kabar bahwa belakangan kegiatan tersebut dipakai untuk ajang jual-beli gelar, meski tanpa sepengetahuan dan tidak ada tanda tangan raja. Dari hasil pengegedahan Polda Jateng, disita barang bukti berupa komputer, printer, dan blangko *kekancingan* (piagam gelar). Tampaknya, sebagian masyarakat masih tergiur dengan gelar priayi dari keraton kendati mereka hidup di era modern. Terbit sepotong pertanyaan, sebetulnya bagaimana kita memahami gelar tersebut dalam kaca mata historis?



Dok

jabatan seseorang dalam pemerintahan. Gelar, baik gelar keturunan maupun jabatan dalam pemerintahan, merupakan sebutan yang melekat pada nama seseorang. Gelar keturunan melekat pada nama seseorang dan menurun pada anak-cucu. Gelar jabatan hanya melekat pada nama orang yang menduduki suatu jabatan, dan itu dapat berubah, kalau kedudukan orang ini berubah, misalnya naik pangkat.

Saya sodorkan contoh struktur kepangkatan *abdi dalem niyaga* Keraton Kasunanan. Pangkat yang menduduki posisi tertinggi ialah *Paneuwu (Bupati)* dengan gelar *Kanjeng Raden Tumenggung*, sementara pangkat yang paling rendah adalah *Jajar* dengan gelar *Raden Bekel*. Apabila diurutkan dari bawah ke atas, pangkat *abdi dalem niyaga* Kasunanan sebagai berikut: pangkat *Jajar (Raden Bekel)*, *Lurah Sor-soran* dan *Lurah* dengan sebutan *Raden Lurah (RL)*, pangkat *Mantri* bergelar *Raden Ngabehi (R.Ng.)*, *Bupati Anom* bergelar *Raden Tumenggun*

Kini, zaman telah berubah. Gelar di era Republik hanyalah simbol atau embel-embel.

kepriayaan dari bawah. Se-dari usia 16 tahun sudah mengabdikan di Kepatihan, dengan jabatan *Jajar niyaga* Kepatihan. Berikutnya, ia bermobilisasi struktural menjadi *Jajar niyaga tengen (kanan) Kasepuhan*. Karier-nya makin menanjak, setahun kemudian menjadi *miji pangender niyaga kiwa (kiri) Kasepuhan*.

Dengan status priayi, dia berhasil masuk menjadi anggota organisasi Budi Oetomo. Kesempatan masuk organisasi tersebut dipandang sebagai suatu keistimewaan dan hak priayi. Bersama priayi lainnya, dia mengadakan pertemuan di Soos Habiprojo yang berada di sebelah barat Kemlayan, kampung yang ditempati para seniman istana. Saat senggang, gedung tersebut juga dimanfaatkan warga Kemlayan untuk latihan karawitan dan menari, sebelum dibakar bala tentara Belanda pada Desember 1948 saat menduduki

dan berkegiatan budaya di Soos Habiprojo. Diberitakan pula, untuk memudahkan pengelolaan manajemen gedung, dibentuk struktur pengurusan, dan seorang seniman asal Kemlayan bernama Goenopangrawit tercatat sebagai anggotanya. Tanggal 1. Saero 1847 (Jawa) diadakan rapat pergantian *bestuur societel Habiprojo*. RT Soswonagoro terdaftar sebagai presiden, dan M.Ng. Djojopraktikno menjabat sebagai sekretaris. Tercatat ada tigapuluh priayi yang jadi anggota *commissaris* antara lain, Goenopangrawit, Josowidagdo, Djogokoesoemo, Poerwopradoto, Doedosoediro, dan lainnya.

Dengan gelar kepriayaan itu, *niyaga* dari Kemlayan bebas berlatih kesenian di Soos Habiprojo dan juga bisa menghadiri pesta kerabat raja. Mereka datang memaikan gamelan dan mengiringi pertunjukan tari demi menghibur tamu dari lapis-

dek berkeris atau berpantolan putih. Saat Lebaran tiba, gedung dipakai untuk halal-bihalal kaum priayi. Koran lokal menginformasikan, pada 1927 digelar pertemuan perayaan Hari Raya Syawal yang lazim disebut halal-bihalal. 300 orang hadir pada acara ini, di antaranya B.K.P.H. Koesomojoedo, B.K.P.H. Djatikoesoemo dan beberapa priayi (*Darmo Kondo*, 11 April 1927).

Dengan mengetengahkan bukti historis ini, sulit diragukan lagi bahwa *tempo dolewe*, gelar yang disematkan adalah bagian penting dari penegasan diri seorang priayi dan dianggap sesuatu yang prestisius oleh masyarakat. Untuk meraih gelar pun harus melewati proses panjang, selain dituntut mumpuni di bidangnya karena ia bukan keturunan bangsawan yang memudahkan mereka memperoleh gelar.

Kini, zaman telah berubah. Gelar di era Republik hanyalah simbol atau embel-embel. Masyarakat sekarang lebih menuntut bukti konkret alias hasil kerja nyata dan ke-